
**Strategi Kebijakan Fiskal Pada Industri Minyak Dan Gas Bumi Dengan Pendekatan Kebijakan
Rezim *Gross Split* Dan Rezim *Production Sharing Contract Cost Recovery*
(Studi Kasus Pada PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.)**

Zaneta Cahaya Fitri*)

Budi Wahono)**

Restu Millanintyas*)**

Email : zaneta.cf@gmail.com

Program Studi Manajemen

Universitas Islam Malang

Abstract

Oil and gas exploration and production activities are a strategic and potential industry for the Indonesian people. The availability of oil and gas as an energy source is one of the main factors in increasing a nation's income. In 2017, the cost recovery scheme was changed to gross split. The background for changing PSC cost recovery to gross split is because cost recovery is considered ineffective and inefficient. Therefore, a study was conducted which aims to determine the fiscal analysis used by the government in regulating oil and gas with the gross split regime approach and PSC cost recovery and to find out which is more profitable between the two methods used, namely PSC cost recovery and gross split. The fiscal analysis carried out by the government in oil and gas exploitation in Indonesia is to divide the fiscal terms for the two regimes, cost recovery and gross split, so that the take taken by the government and contractors is not mutually beneficial and fair. As well as comparing cashflow schemes between cost recovery and gross split, as well as conducting an economic analysis to obtain the results of which scheme is more feasible to be applied in Indonesia.

Keywords: *Production Sharing Contract, Gross Split, Cost Recovery, Fiscal Terms*

Pendahuluan

Latar Belakang

Penggunaan kekayaan alam harus dioptimalkan untuk kemakmuran dalam model usaha pertambangan. Dengan dilakukannya perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi usaha, penguasaan atau pemilikan kekayaan alam tidak otomatis dapat melakukan usaha penambangan. Apalagi jika ada pemisahan yang jelas antara penyelenggara administrasi negara dengan administrasi usaha. Agar penguasaan atau pemilikan kekayaan alam itu dapat melakukan usaha pertambangan diperlukan proses penyerahan kuasa usaha pertambangan. Mengingat luasnya Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia (WHPI) maka untuk tujuan efisiensi pengusahaan dapat dipecah menjadi bentuk wilayah kerja pertambangan (PU,2010).

Berbicara mengenai kegiatan produksi migas di Indonesia, tidak lepas dari sejarah panjang yang menaunginya. Peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pertambangan pertama kali lahir pada tahun 1899, yaitu Indische Min Wet (IMW), yang berisi bagaimana pemerintah Hindia Belanda menyatakan penguasaannya atas mineral dan logam di Indonesia (Departmen Pertambangan dan Energi. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertambangan. 1991). Sistem yang digunakan pada saat itu adalah sistem konsesi, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada kontraktor pertambangan, penyelenggara usaha pertambangan, dan sebagai pemegang kuasa pertambangan untuk berhak sepenuhnya atas penguasaan tanah dan sumber daya alam (HS, 2014). Pemerintah Hindia Belanda

memberikan keleluasaan dengan tidak adanya campur tangan pemerintah dan tidak diwajibkan bagi kontraktor untuk membagi keuntungan hasil produksi pertambangan, hanya diwajibkan membayar beberapa kewajiban ringan seperti pajak dan royalti. Akhirnya pada tahun 1905 dan tahun 1910, terdapat perbaikan kebijakan IMW dan dilengkapi dengan Mijordonnantie (Ordonansi Pertambangan) (Chalid Muhammad).

Aktivitas eksplorasi serta penciptaan minyak serta migas ialah industri strategis serta potensial untuk bangsa. Ketersediaan migas selaku tenaga jadi aspek meningkatnya pemasukan sesuatu bangsa. Indonesia ialah negeri dengan cadangan minyak terbanyak di Kawasan Asia Tenggara sehingga menjadikannya selaku lumbung migas menjanjikan serta jadi tujuan investasi zona migas di dunia. Industri migas di Indonesia sudah menyumbang 62, 2% APBN Indonesia (Kementerian ESDM). Kegiatan pengelolaan bisnis migas di Indonesia digolongkan dalam dua kegiatan utama yaitu bisnis hulu migas (upstream) dan bisnis hilir migas (downstream). Dalam bisnis hulu migas terdapat dua kegiatan besar yaitu eksplorasi dan eksploitasi/produksi. Dalam pengelolaan bisnis hulu migas, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan perusahaan/pihak ketiga tertentu yang diikat dengan suatu kontrak yaitu Kontrak Kerja Sama (KKS) dan dengan menggunakan skema fiskal tertentu.

Kegiatan hulu migas terdiri dari 2 proses yaitu eksplorasi dan eksploitasi/produksi. Kegiatan eksplorasi merupakan Langkah awal proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan sumur migas dengan cara menyelidiki dengan penuh perhitungan terhadap wilayah atau daerah yang mengandung minyak dan gas bumi. Sedangkan kegiatan bisnis eksploitasi/produksi merupakan tahapan selanjutnya sesudah ditemukan sumur/ladang yang mengandung minyak dan gas bumi. Selanjutnya merupakan kegiatan bisnis hilir migas. Kegiatan bisnis hilir migas merupakan pengolahan migas alam sampai dengan pemasaran hasil produksi. Bisnis hilir ini terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Kegiatan pengolahan dimaksudkan untuk memurnikan minyak mentah yang proses pengolahannya dilakukan di kilang (Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas).

Penerimaan SDA migas diduga dipengaruhi oleh perubahan beberapa variable seperti lifting, cost recovery, harga minyak dunia melalui Inonesia Crude Oil Price (ICP), Kurs Rp/USD, dan naiknya komponen pengurang (PBB, Pengembalian PPN, Pajak dan Retribusi Daerah) karena adanya peningkatan aktivitas eksplorasi. Dengan bervariasinya variabel yang mempengaruhi penerimaan SDA migas maka hubungan antara penerimaan migas dengan dan lifting tidak selalu linier. Hal ini terjadi pada wilayah kerja pertambangan baru sehingga naiknya lifting tidak selalu diikuti dengan naiknya penerimaan negara dalam APBN (Praptono, 2017).

Production Sharing Contract (PSC) Agreement atau Kontrak Bagi Hasil merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang minyak dan gas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam ini (Erwinsyah Defra Uma Lubis, “Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract di Indonesia, Jurnal Patra ITB, 2016). PSC di Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak diimplementasikan di Indonesia pada tahun 1961.

Kerangka Teori

Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada dasarnya ialah serangkaian kebijakan yang dicoba oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pemasukan serta pengeluaran duit negeri (Syamsi, 1983). Penerimaan negeri bersumber dari pajak, Penerimaan Negeri Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan lain yang berasal pinjaman/dorongan luar negara dari luar negara. Kebijakan fiskal Indonesia direfleksikan dalam Anggaran

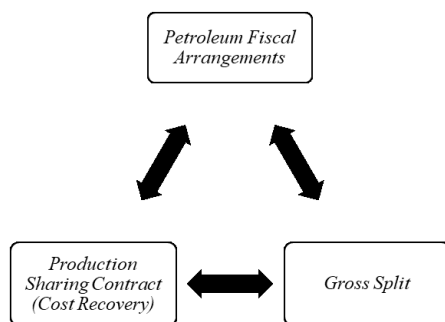
Komentar Belanja Negeri(APBN) dimana pemerintah menetapkan alokasi serta distribusi keuangan negeri dalam satu periode berjalan.

Kebijakan Fiskal dalam Pengusahaan Migas di Indonesia

Pengusahaan migas merupakan sektor yang strategis bagi negara Indonesia. Oleh karenanya, perlu diatur kebijakan atau skema fiskal yang dapat memaksimalkan manfaat dari pengusahaan migas bagi bangsa dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal dalam pengusahaan migas didasarkan pada bagi hasil (PSC). Artinya pemerintah mengadakan kerjasama pengelolaan migas dengan kontraktor KKS dimana hasil akhir adalah pembagian migas sesuai proporsi masing-masing. PSC merupakan bentuk kerjasama usaha pertambangan migas antara pemerintah sebagai pemegang manajemen dengan perusahaan minyak asing maupun nasional sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan PSC selalu ada campur tangan pemerintah yang kadarnya tergantung dari sifat dan peran industri perminyakan terhadap ekonomi nasional. Dalam aspek ekonomi fiskal migas di Indonesia.

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Jenis, Lokasi, dan Waktu

Riset ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatannya yaitu model kualitatif. Metode deskriptif komparatif dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai pendapatan negara ketika menggunakan PSC *cost recovery* ataupun *gross split*. dilakukan pada bulan November 2020 – Mei 2021.

Populasi Penelitian

Populasi dalam riset ialah 13 perusahaan minyak serta gas bumi terdaftar dalam website bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Sampel Penelitian

Jumlah sampel ditetapkan dalam riset ialah satu perusahaan. Pengambilan sampel memakai *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan syarat – syarat tertentu. Adapun syarat – syarat tersebut yaitu:

1. Perusahaan yang pernah menggunakan 2 skema PSC *cost recovery* maupun *gross split*.
2. Perusahaan yang dapat memberikan data lapangan untuk perhitungan skema *gross split*.

Hasil dan Pembahasan

Perhitungan *Fiscal Terms Cost Recovery*

<i>Gross Revenue</i>	US\$ 213.389.930
FTP	US\$ 42.677.986
FTP <i>Share</i> - <i>Government</i>	US\$ 30.367.028
FTP <i>Share</i> - <i>Contractor</i>	US\$ 12.310.957
Equity to be Split (ETS)	US\$ 128.808.924
<i>Split Share</i> - <i>Government</i>	85%
<i>Split Share</i> - <i>Contractor</i>	15%
<i>Tax Rate</i> <i>Contractor</i>	52%
<i>Equity Share</i> - <i>Government</i>	71%
<i>Equity Share</i> - <i>Contractor</i>	29%
<i>Government Split /</i> <i>Equity</i>	US\$ 91.652.503
<i>Contractor Split /</i> <i>Equity</i>	US\$ 37.156.420
<i>Domestic Market</i> <i>Obligation (DMO)</i>	US\$ 15.388.697
<i>DMO Fee</i>	US\$ 2.308.305
<i>Taxable Incomes</i> - <i>Government</i>	0
<i>Taxable Incomes</i> - <i>Contractor</i>	US\$ 49.467.378
<i>Tax Rate</i>	48%
<i>Government Take</i>	US\$ 23.744.341

Cashflow Cost Recovery

Total <i>cashflow</i>	US\$ 391.479.849
-----------------------	------------------

Indikator Keekonomian *Cost Recovery*

INDIKATOR KEEKONOMIAN		
NPV@10%	US\$ 235.746.736	
IRR	9	%
POT	9,11	Year
DPI	0,16	

Perhitungan *Fiscal Terms Gross Split*

<i>Gross Revenue</i>	US\$ 4.015.240
<i>Cont. Split</i>	65% (US\$ 138.703.454)
<i>Gov. Split</i>	35% (US\$ 76.686.475)
<i>Taxable Income Contractor</i>	US\$ 138.703.454
<i>Taxable Income Contractor</i>	40% (55.461.387)
<i>Government Take</i>	61% (US\$ 130.167.857)
<i>Contractor Take</i>	39% (US\$ 83.222.073)

Cashflow PSC Gross Split

<i>Total Cashflow</i>	US\$ 639.891.650
-----------------------	------------------

Indikator Keekonomian *Gross Split*

INDIKATOR KEEKONOMIAN		
NPV@10%	US\$ 300.861.321	
IRR	14	%
POT	2,25	Year
DPI	0,31	

Perbandingan *Take Antar PSC*

	<i>PSC Cost Recovery</i>	<i>PSC Gross Split</i>
<i>Government Take</i>	US\$ 145.763.873	US\$ 130.167.857
<i>Contractor Take</i>	US\$ 67.626.057	US\$ 83.222.073

Nampak kalau pemasukan didapat pihak pemerintah lebih besar memakai skema PSC cost recovery, sebaliknya pihak kontraktor lebih diuntungkan memakai skema gross split. Dalam perihal ini, belum lumayan fakta manakah yang lebih menguntungkan buat pemerintah ataupun kontraktor.

Berikutnya dicoba perbandingan terhadap cashflow antar kedua skema PSC..

Perbandingan *Cashflow*

	<i>Cashflow</i>
<i>Cashflow PSC Cost Recovery</i>	US\$ 391.479.849
<i>Cashflow PSC Gross Split</i>	US\$ 639.891.650

Dari perbandingan cashflow skema PSC, skema PSC gross split membagikan cashflow yang jauh lebih besar dibanding cashflow yang memakai PSC cost recovery.

Terakhir melaksanakan perbandingan terhadap penanda keekonomian kedua skema terdapat.

Perbandingan Indikator Keekonomian

Indikator Keekonomian			
	<i>Cost Recovery</i>	<i>Gross Split</i>	
NPV@10%	US\$ 235.746.736	US\$ 300.861.321	
IRR	9	14	%
POT	9,11	2,25	Year
DPI	0,16	0,31	

Dari hasil penanda keekonomian pada tabel di atas, NPV pada skema gross split lebih besar daripada skema cost recovery. Serta pula nampak pada hasil IRR, POT serta DPI, skema gross split lebih layak buat dicoba. Industri tersebut ialah industri migas yang go- public. Dengan terdapatnya skema baru ialah PSC gross split mengambil alih skema PSC cost recovery, hingga industri ini dicoba analisis serta perhitungan kedua skema tersebut. Hasil dari analisis serta perhitungan dari kedua skema tersebut bisa memastikan apakah skema PSC gross split layak buat jadi pengganti skema PSC cost recovery sudah diterapkan semenjak tahun 1960- an sampai akhir tahun 2016. Pada skema PSC Gross Split perbandingan yang sangat mencolok ialah absennya bayaran pemulihan semacam terdapat pada skema PSC cost recovery. Tidak cuma absennya bayaran pemulihan, perbandingan mencolok lainnya ialah terdapatnya variabel split serta progresif split yang membolehkan pihak kontraktor buat memperoleh split lebih daripada base split yang berlaku. Pada perhitungan hasil pemasukan, skema PSC gross split pula lebih simpel dibanding dengan skema PSC cost recovery. Lewat perhitungan dari kedua skema tersebut, diperoleh besaran cashflow yang lebih besar dengan memakai skema PSC gross split sebesar US\$ 639. 891. 650 dibanding dengan skema PSC cost recovery yang cuma sebesar US\$ 391. 479. 849. Buat nominal take yang diperoleh pihak pemerintah serta kontraktor mempunyai hasil sama besar kala memakai skema cost recovery serta gross split. Dengan skema PSC cost recovery pemerintah menemukan bagian sebesar US\$ 145. 763. 873 serta dengan skema gross split, kontraktor menemukan bagian sebesar US\$ 67. 626. 057. Buat perolehan pemerintah serta kontraktor dengan skema PSC gross split sebesar 36. 226. 599. 828, 15 US\$ serta 35. 101. 748 US\$. Tetapi buat memandang kelayakan skema psc gross split selaku pengganti skema PSC cost recovery tidak cuma bisa dilihat dari cashflow serta nominal take dari tiap- tiap pihak. Dilihat pada tabel 4. 22, penanda keekonomian skema PSC gross split jauh lebih baik dibanding dengan hasil dari skema PSC cost recovery. Buat NPV dengan suku bunga 10%, nominal yang diperoleh dengan skema PSC gross split menggapai US\$ 331, 678, 487. 41, sebaliknya dengan skema PSC cost recovery sebesar US\$ 213, 832, 100. 83. Buat IRR dengan skema PSC gross split mendapatkan persentase sebesar 14%, lebih besar dibandingkan dengan IRR skema PSC cost recovery yang menggapai 9%. Buat POT skema PSC gross split lebih kilat ialah pada 2, 25 tahun sejak kontrak diawali, sebaliknya POT dengan skema PSC cost recovery diperoleh pada 9, 11 tahun sejak kontrak diawali. Sebaliknya buat DPI dengan skema PSC gross split lebih tinggi sebesar 0, 31, sebaliknya buat skema PSC cost recovery cuma sebesar 0, 16. Sehingga diperoleh kesimpulan kalau dengan memakai skema PSC gross split, pihak pemerintah ataupun kontraktor hendak lebih diuntungkan serta proyek layak buat dilaksanakan.

Simpulan

Bersumber hasil analisis serta perhitungan menggunakan kedua skema terhadap lapangan, bisa mendapat simpulan :

1. Analisis fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengusahaan migas di Indonesia yaitu melakukan pembagian *fiscal terms* untuk kedua rezim tersebut *cost recovery* maupun *gross split* supaya *take* yang diambil pemerintah maupun kontraktor tidak saling merugikan dan adil. Serta melakukan perbandingan skema *cashflow* diantara *cost recovery* dan *gross split*, serta melakukan analisis keekonomian untuk memperoleh hasil skema mana yang lebih layak diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah sudah tidak mewajibkan *gross split* sebagai analisis fiskal yang digunakan di Indonesia karena banyaknya kontraktor migas yang tidak setuju dengan menggunakan sistem *gross split* dikarenakan tidak adanya biaya penggantian produksi minyak.
2. Berdasarkan perbandingan skema yang telah dijelaskan, kontraktor maupun pemerintah lebih memilih menggunakan sistem *cost recovery* walaupun terkadang dalam pelaksanaan *cost recovery*, biaya produksi banyak yang melakukan *mark-up* sehingga pemerintah rugi. Namun jika dilakukan skema *gross split*, banyak kontraktor migas yang tidak setuju sehingga hal ini akan berdampak pada produksi migas di Indonesia.

Saran

Pada penyusunan harian ini, penulis bisa membagikan anjuran:

1. Pakai parameter harga minyak yang mendekati keadaan sesungguhnya supaya hasil perhitungan pula bisa menggambarkan tingkatan keekonomian pada waktu tersebut.
2. Senantiasa simak pertumbuhan tentang regulasi migas di Indonesia khususnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM.
3. Jalani kenaikan ataupun penyusutan harga migas supaya bisa membagikan hasil signifikan terhadap hasil perhitungan.

Daftar Pustaka

Afiati, N., Irham, S., & Pramadika, H. (2020). “ Analisis Keekonomian Blok NSRN Dengan Memakai PSC Gross Split Serta Akumulasi Diskresi”. PETRO: Harian Ilmiah Metode Perminyakan, 9(2), 88.

Akhir, L. T., Teknologi, F., Serta, E., Riset, P., Perminyakan, T., & Pertamina, U. (2020). “ Analisis Keekonomian Pada Lapangan N Blok Gram dengan Model Ekonomi Production Sharing Contract Cost Recovery serta Gross Split”.

Amir, H. (2017). “ Tingkatkan Penciptaan Minyak Nasional: Mungkinkah? In Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas”.

Andri Prima, William, & Kartoatmodjo, T. (2017). “ Riset Kelayakan Keekonomian Pada Pengembangan Lapangan”. Seminar Nasional Cendekiawan Ke 3 Tahun 2017, 273–278.

DPR Republik Indonesia [http:// www. dpr. go. id/ tentang/ tugas- wewenang](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang).

Departemen ESDM Republik Indonesia. [www. esdm. go. id](http://www.esdm.go.id)



e – Jurnal Riset Manajemen **PRODI MANAJEMEN**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma
website : www.fe.unisma.ac.id (email : e.jrm.feunisma@gmail.com)

Departemen Keuangan Republik Indonesia. [www. kemenkeu. go. id](http://www.kemenkeu.go.id)

Zaneta Cahaya Fitri*) Adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

Budi Wahono**) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

Restu Millaningtyas***) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA